

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan perekonomian di Indonesia sangat bergantung pada pembangunan sektor pariwisata. Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan wisata dan didukung melalui berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut Hidayat (Depdikbud, 1995:1) pengembangan pada industri pariwisata di Indonesia dapat memberikan banyak manfaat karena Indonesia memiliki potensi yang menarik yaitu adanya objek wisata budaya dan juga objek wisata alam yang dapat dikembangkan hingga kancan internasional.

Menurut Soebagyo (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia” bahwa usaha pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh adanya 4 bidang utama yakni sosial, budaya, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Terdapat tiga fungsi dalam pengembangan pariwisata menurut Joyosuharto (1995) dalam bukunya yang berjudul “Aspek Ketersediaan (*Supply*) Dan Tuntutan Kebutuhan (*Demand*) Dalam Pariwisata” yaitu adanya pengembangan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, memelihara kepribadian bangsa, mutu lingkungan hidup dan kelestarian fungsi,

serta memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Sejalan dengan pendapat Pedit (1990) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Pariwisata” menjelaskan bahwa adanya pengembangan pariwisata meberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan berbagai sektor produksi dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena berpengaruh dalam perluasan lapangan pekerjaan, sebagai bentuk sarana pelestarian lingkungan hidup dan budaya, serta berkontribusi untuk memajukan dunia usaha terutama dalam bidang pariwisata, dan berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sektor pariwisata yang selalu mengalami perkembangan. Peningkatan jumlah daya tarik wisata yang signifikan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2020. Daya Tarik wisata merupakan modal utama dalam upaya pengembangan kawasan wisata di suatu daerah, hal ini dikarenakan faktor utama peningkatan kunjungan wisatawan adalah daya tarik wisatanya. Menurut Pedit (Utama, 2016) menjelaskan bahwa daya tarik wisata ialah segala sesuatu yang menarik dan memiliki nilai (*value*) untuk dilihat maupun dikunjungi oleh para wisatawan.

Tabel 1.1

Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah Daya Tarik Wisata
2016	538
2017	641
2018	750
2019	917
2020	1069
2021	1063

2022	1300
------	------

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat peningkatan jumlah daya tarik wisata di Prov. Jawa Tengah dari tahun 2016-2022, hal tersebut menandakan bahwa potensi wisata di Provinsi Jawa Tengah semakin beragam sehingga memikat wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. Berikut data terkait jumlah daya tarik wisata berdasarkan kabupaten/kota di Prov. Jawa Tengah dari tahun 2016-2021.

Tabel 1.2

Jumlah Daya Tarik wisata Berdasarkan Kab/Kota di Prov. Jawa Tengah Tahun 2016-2021

Kab/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Cilacap	22	23	22	25	25	33
Kabupaten Banyumas	24	24	24	35	101	76
Kabupaten Purbalingga	12	13	30	47	51	21
Kabupaten Banjarnegara	15	15	15	21	28	20
Kabupaten Kebumen	9	9	20	31	31	47
Kabupaten Purworejo	3	34	37	52	55	32
Kabupaten Wonosobo	8	8	8	8	8	9
Kabupaten Magelang	17	23	28	68	69	66
Kabupaten Boyolali	15	47	53	53	53	42
Kabupaten Klaten	15	15	15	27	37	32
Kabupaten Sukoharjo	2	2	3	4	5	22
Kabupaten Wonogiri	8	8	8	9	10	27
Kabupaten Karanganyar	20	18	18	19	23	40
Kabupaten Sragen	30	34	50	50	50	20
Kabupaten Grobogan	13	14	17	20	22	21
Kabupaten Blora	17	20	22	26	23	30
Kabupaten Rembang	10	20	20	21	31	35
Kabupaten Pati	23	24	24	26	26	37
Kabupaten Kudus	39	39	39	39	39	17
Kabupaten Jepara	37	36	39	40	40	42
Kabupaten Demak	8	8	8	5	6	7

Kabupaten Semarang	36	41	41	44	50	50
Kabupaten Temanggung	5	6	6	13	19	13
Kabupaten Kendal	15	15	27	40	43	35
Kabupaten Batang	8	8	16	38	40	41
Kabupaten Pekalongan	21	28	28	32	37	48
Kabupaten Pemalang	16	16	16	17	31	29
Kabupaten Tegal	4	4	4	4	3	4
Kabupaten Brebes	13	13	17	17	17	49
Kota Magelang	10	10	11	12	12	11
Kota Surakarta	8	9	24	24	24	16
Kota Salatiga	6	6	5	5	5	6
Kota Semarang	39	41	45	34	41	72
Kota Pekalongan	6	6	6	7	7	7
Kota Tegal	4	4	4	4	7	7

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel 1.2, jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dari tahun 2016-2021 terus meningkat. Apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang di sebelah utara yaitu Kota Semarang cenderung mengalami kondisi fluktuatif, yakni keadaan naik turun yang tidak tetap. Pada sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali dengan daya tarik wisata yang juga mengalami kondisi fluktuatif. Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Magelang berbatasan langsung di sebelah barat dengan daya tarik wisata yang mengalami kondisi naik turun tidak tetap. Apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Semarang, daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dapat dikatakan lebih stabil dan cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 1.3

Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Daya Tarik Wisata
2016	36
2017	41
2018	41
2019	44
2020	50
2021	50

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, 2021

Kabupaten Semarang sebagai salah satu daerah di Prov. Jawa Tengah yang menonjolkan sektor pariwisatanya, hal tersebut sejalan dengan salah satu misi pembangunan kepariwisataan tahun 2020-2025 yang menfokuskan pada peningkatan kemandirian perekonomian daerah melalui sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.

Daya tarik wisata di Kabupaten Semarang tidak mengalami kondisi fluktuatif, namun tidak seluruh destinasi wisata dikelola secara optimal, sehingga penelitian ini memilih lokus di Kabupaten Semarang. Pengelolaan pariwisata yang belum optimal tersebut terdapat di Kecamatan Banyubiru. Pada Kecamatan Banyubiru terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kategori KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) dengan Daya Tarik Wisata (DTW) Andalan, diantaranya yaitu KSPK Kawasan Kebondowo, KSPK Kawasan Muncul, dan KSPK Kawasan Wirogomo.

Tabel 1.4

Daya Tarik Wisata (DTW) Andalan di Kecamatan Banyubiru

No.	KSPK	Destinasi Wisata
1.	KSPK Kawasan Kebondowo	- Bukit Cinta Rawa Pening
2.	KSPK Kawasan Muncul	- Taman Rekreasi Langen Tirta Muncul - Pemandian Air Alam Muncul - Muncul Water Park - Jembatan Tebing Ondo Langit, Gumuk Reco - Muncul River Tubbing
3.	KSPK Kawasan Wirogomo	- Curug Kembar Baladewa

Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kab. Semarang 2020-2025

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 bahwa Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara lokal, regional dan nasional;
- c. Memiliki potensi pasar skala lokal, regional, nasional dan/ atau internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki keunggulan dan kekhususan pariwisata;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial lokal, regional dan nasional;
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Apabila ditinjau melalui kriteria KSPK tersebut, bahwa KSPK yang ada di kecamatan Banyubiru tidak seluruhnya memenuhi kriteria. Salah satunya yaitu KSPK Kawasan Muncul. Pada KSPK Kawasan Muncul terdapat destinasi wisata Air Alam Muncul yang masih memiliki permasalahan pariwisata berupa fasilitas penunjang pariwisata yang tidak memadai dan aksesibilitas menuju destinasi wisata yang sulit, hal tersebut tidak memenuhi kriteria KSPK pada point f, h dan j. Wisata Air Alam Muncul sebagai salah satu dari empat destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh Pemkab Semarang melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, namun pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Maka dari itu penelitian ini memilih lokus di Kecamatan Banyubiru, tepatnya yaitu di wisata Air Alam Muncul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada dasarnya telah menyediakan anggaran untuk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang, terutama pada empat destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yaitu obyek wisata Candi Gedong Songo, Pemandian Air

Alam Muncul, Bukit Cinta, dan Museum Kereta Api Ambarawa. Berikut data mengenai anggaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021.

Tabel 1.5

Anggaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran
2017	Rp. 11.310.300.000
2018	Rp. 16.121.695.000
2019	Rp. 23.696.026.000
2020	Rp. 4.697.281.000
2021	Rp. 15.003.993.500

Sumber: Rancangan APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021

Anggaran yang disediakan untuk pembangunan kepariwisataan terutama pada empat destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang belum dikerahkan secara optimal. Terdapat ketidakmerataan pembangunan kepariwisataan pada empat destinasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Ketidakmerataan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang merupakan beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang ada di destinasi wisata Bukit Cinta Rawa Pening dan Museum Kereta Api Ambarawa. Fasilitas penunjang pariwisata yang dimiliki sudah jauh lebih memadai apabila dibandingkan dengan wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru. Padahal destinasi wisata tersebut juga dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Gambar 1.1 Fasilitas Penunjang Pariwisata yang Memadai di Destinasi Wisata Lainnya yang dikelola Dinas Pariwisata Kab. Semarang



Sumber: Dokumentasi Pribadi (14 September 2022)

Gambar 1.2 Fasilitas Penunjang Pariwisata yang Tidak Memadai di Destinasi Wisata Air Alam Muncul



Sumber: Dokumentasi Pribadi (14 September 2022)

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata. Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan pada objek wisata Air Alam Muncul belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat fasilitas penunjang yang tidak memadai, seperti toilet yang kotor dan sanitasi yang kurang bersih, smooking area yang kotor

dan disalah gunakan oleh pengunjung maupun pengelola pariwisata, serta ruang laktasi yang sangat minim dan tidak dipergunakan dengan semestinya. Selain itu permasalahan lain yang ada di destinasi Wisata Air Alam Muncul yaitu belum adanya media informasi maupun loket pelayanan informasi masyarakat yang memberikan penjelasan terkait destinasi wisata.

Gambar 1.3 Penataan Ruang dan Bangunan yang Tidak Layak di Destinasi Wisata Air Alam Muncul



Sumber: Dokumentasi Pribadi (14 September 2022)

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penataan ruang yang belum optimal dan beberapa sudut bangunan yang sudah tidak layak. Selain itu, masih terdapat kendala pada aksesibilitas menuju destinasi wisata Air Alam Muncul salah satunya yaitu transportasi publik yang belum memadai menuju destinasi wisata Air Alam Muncul. Tidak seluruh wilayah desa/kecamatan yang ada di Banyubiru dilalui oleh transportasi publik berupa angkutan umum. Desa/Kelurahan yang tidak memiliki angkutan umum yaitu daerah Wirogomo, Kemambang, Sepakung, dan Gedong.

Tabel 1.6

Sarana Transportasi Angkutan Umum di Kecamatan Banyubiru Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Ketersediaan Angkutan Umum
Wirogomo	Tidak ada angkutan umum
Kemambang	Tidak ada angkutan umum
Sepakung	Tidak ada angkutan umum
Kebumen	Ada, dengan trayek tetap
Gedong	Tidak ada angkutan umum
Rowoboni	Ada, dengan trayek tetap
Tegaron	Ada, dengan trayek tetap
Kebondowo	Ada, dengan trayek tetap
Banyubiru	Ada, dengan trayek tetap
Ngrapuh	Ada, dengan trayek tetap

Sumber: Kecamatan Banyubiru Dalam Angka 2022

Permasalahan terkait pembangunan fasilitas penunjang pariwisata dan aksesibilitas menuju destinasi wisata Air Alam Muncul yang tidak memadai juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Aan Diyan Saputra dengan judul “Profil Pengunjung Objek Wisata Pemandian Muncul Kabupaten Semarang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu fasilitas penunjang pariwisata, pelayanan pengelola pariwisata, dan kebersihan yang menjadi permasalahan wisata dan perlu diperhatikan kembali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai pihak pengelola pariwisata.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang diatur dalam Perda Kab. Semarang No. 8 Tahun 2019. Berdasarkan perda tersebut, fokus yang dibahas dalam penelitian ini adalah pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata diatur dalam Pasal 26 yaitu meliputi :

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KPPK dan KSPK;
- b. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan KPPK dan KSPK;
- c. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi pengembangan KPPK dan KSPK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pada pembangunan aksesibilitas pariwisata diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi

Selanjutnya yaitu pada pembangunan kelembagaan kepariwisataan diatur dalam Pasal 46 meliputi:

- a. Penguatan organisasi kepariwisataan
- b. Pembangunan SDM pariwisata

Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melakukan pembangunan kepariwisataan, terutama pada destinasi wisata yang dikelola secara langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Pada kenyataannya masih terdapat destinasi wisata yang mengalami permasalahan terutama terkait aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang belum memadai. Atas dasar permasalahan

tersebut muncul pertanyaan penelitian **“mengapa fasilitas penunjang pariwisata dan aksesibilitas menuju destinasi wisata Air Alam Muncul belum memadai?”**

Atas dasar latar belakang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Destinasi Wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata tidak memadai
2. Keterbatasan aksesibilitas menuju destinasi wisata Air Alam Muncul
3. Penataan ruang dan bangunan yang sudah tidak layak di destinasi wisata Air Alam Muncul

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul?
2. Apa sajakah faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis factor-faktor dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan literature kajian mengenai perkembangan ilmu administrasi publik, terutama pada pembangunan sektor kepariwisataan daerah
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun pustaka acuan bagi yang melaksanakan penelitian dengan permasalahan relevan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang terkait pembangunan kepariwisataan pada objek wisata Muncul sebagai salah satu objek wisata yang dikelola secara langsung,

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam upaya pembuatan kebijakan yang relevan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan informasi tentang pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata air Muncul, sehingga masyarakat pun dapat berpartisipasi dan turut serta mendukung pembangunan pariwisata daerah.

c. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait pembangunan kepariwisataan daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama diawali dengan penelitian oleh Heri Maulana, Endang Larasati Setyaningsih, dan Dyah Lituhayu (2012) dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pati”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan perolehan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai strategis, lingkungan internal dan eksternal serta faktor-faktor pendukung dan penghambat, dengan menggunakan teknik analisi SWOT sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat masih rendah dalam upaya

pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati. Kurangnya komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata sektor pariwisata dan kurangnya pengelolaan obyek wisata mengakibatkan beberapa obyek wisata di Kabupaten Pati menjadi tidak terawat dan terbengkalai.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Oki Widyanarko (2020) dengan judul “Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitiannya, Oki Widyanarko menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perolehan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teori George C. Edward III digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada 4 variable pokok meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan belum secara optimal menerapkan empat variable dari teori Edward III yang digunakan sebagai acuan. Diperlukan adanya pembenahan dalam pengembangan organisasi Dinas Pariwisata.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Agustina Pallewa (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara”. Agustina dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung sebagai sumber data primer, kemudian dokumentasi sebagai sumber data sekunder yang merupakan data pendukung. Agustina menggunakan teori George Edward III sebagai acuan penulisan

penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan kepariwisataan di kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal secara keseluruhan, ditemukan beberapa kendala terkait kurangnya koordinasi ataupun komunikasi dengan assosiasi pengelola obyek wisata dan masyarakat, kurangnya infrastruktur yang mendukung promosi pariwisata,

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shafira Mediana Putri, dkk (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019)”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Shafira menggunakan metode studi pustaka dalam penulisan penelitian ini. Perolehan data dilakukan melalui jurnal, artikel, buku, dan berbagai sumber informasi lainnya. Teori Van Metter dan Van Horn digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan kawasan Geopark yang dipengaruhi oleh variabel/dimensi seperti yang dikemukakan oleh Van Metter Van Horn. Terdapat beberapa kendala yakni dalam dimensi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur yang belum memadai.

Penelitian terdahulu kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dyah Kusumawardhani, Dewi Rostyaningsih, Aloysius Rengga (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Promosi Potensi Wisata (Pantai Widuri) Kabupaten Pematang”. Peneliti tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Wawancara dan observasi dilakukan dalam penelitian ini guna memperoleh sumber data primer. Teori implementasi dari George Edward III digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya meliputi: Promosi dalam bentuk Personal selling dilakukan melalui pameran dan event. Faktor penghambat meliputi kesenjangan antara kesiapan pengembangan objek wisata dengan gencarnya promosi yang telah dilakukan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pihak terkait tidak terjadi secara efektif.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Medlin Anggreyni (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias”. Medlin Anggreyni menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai acuan dasar penelitian menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu variabel karakteristik pelaksana sebagai salah satu variable dominan yang telah berjalan dengan optimal dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang ada di Kawasan Soziona. Variable standar dan sasaran kebijakan, serta variable sumber daya belum optimal, hal tersebut ditandai dengan adanya keterbatasan sumber daya finansial, serta keterbatasan SDM dengan latar belakang pendidikan terkait pariwisata.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prakash Upadhyay (2019) dengan judul “*Tourism Policy of Nepal and Sustainable Mountain Tourism Development in Retrospect*”. Prakash menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat penilaian retrospektif terhadap kebijakan pariwisata dan upaya pengembangan pariwisata pegunungan yang berkelanjutan di Nepal. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pariwisata belum mampu menangani wisata pegunungan secara optimal, sehingga menyebabkan pertumbuhan sektor pariwisata tidak seimbang. Diperlukan pendekatan secara terpadu yakni struktur federal yang memadai dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oranoot Kosol dan Somsak Amornsiriphong (2019) dengan judul “*Public policy formation for tourism in a natural world heritage site with community network participation: A case study of khao yai national park, Thailand*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan kebijakan publik dan jaringan aktor dengan lokus di Taman Nasional Khao Yai Thailand. Metode penelitian yang digunakan yaitu *Participatory Action Research* (PAR). Pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, dan proses A-I-C (*Appreciation-Influence-Control*). Hasil dari penelitian ini yaitu jaringan aktor yang terbentuk merupakan kolaborasi dari relawan lokal dan komunitas. Implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan rencana strategis pariwisata berkelanjutan yang meliputi rencana strategis sumber daya dan lingkungan, rencana

strategis Pendidikan/hukum, rencana strategis ekonomi pariwisata, dan rencana s
trategis pengembangan jaringan situs warisan dunia.

Penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya bermanfaat untuk membantu peneliti dalam menentukan teori yang relevan, membantu dalam menggali fenomena penelitian, dan sebagai referensi dalam penulisan penelitian. Pada dasarnya, penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Fokus berupa pembahasan dalam penelitian menekankan pada pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan pada destinasi wisata Air Alam Muncul di Kecamatan Banyubiru dengan menganalisis pada pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam mengukur sejauhmana implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan indikator yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini bermanfaat guna menunjang tambahan referensi dengan melihat permasalahan yang ditemui oleh peneliiti dalam melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2008:4) administrasi publik adalah suatu proses dimana personel publik maupun sumberdaya yang ada dikoordinasi dan juga diorganisir guna mengimplementasikan atau melaksanakan, memformulasikan, serta mengelola segala keputusan yang ada dalam kebijakan. Keban juga menjelaskan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan tentang bagaimana suatu pemerintah memiliki peran sebagai suatu agen atau suatu regulator yang memiliki inisiatif di dalam memberikan aturan dalam pengambilan langkah penting bagi seluruh masyarakat. Hal ini karena masyarakat dianggap pihak yang kurang mampu, pasif dan harus menerima seluruh aturan pemerintah (Keban, 2008:4).

Owen Hughes (dalam Keban 2014:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai studi akademik yang berkaitan dengan sector publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Owen Hughes memberikan pandangan bahwa administrasi publik sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju modern governance. Definisi ini untuk selanjutnya dipengaruhi oleh gerakan reformasi administrasi publik yang dikenal dengan New Public Management (NPM). Administrasi publik menurut C.T.Goodsell (Dalam Keban 2014:8) dilihat sebagai upaya untuk menghasilkan integrated public governance dimana seluruh pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik diintegrasikan dengan berdasar pada nilai nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan, dan integritas supaya dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah pun meningkat.

Pada konteks politik, peranan administrasi publik sangatlah penting khususnya di dalam segala perumusan kebijakan negara, di dalam Nigro (1980:14) “Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting di dalam proses perumusan berbagai kebijakan kebijakan negara sehingga menjadi suatu bagian dari proses politik”. Maka dari itu, administrasi publik dapat dipandang sebagai suatu bagian yang penting di dalam segala berbagai pelaksanaan kebijakan kebijakan negara.

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik supaya lebih responsive terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Administrasi Publik berupaya melembagakan praktek-praktek manajemen supaya dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan lebih optimal. Menurut Waldoi (dalam Pasolong, 2014:8), administrasi publik adalah salah satu perwujudan ilmu berupa tindakan mengorganisir dan manajemen sumber daya sumber daya untuk mencapai tujuan pemerintah. Pendapat tersebut berbeda dengan Edward H. Litchfield, yang menyatakan bahwa administrasi publik merupakan studi yang memiliki keterkaitan dengan badan pemerintahan yang diorganisir, difasilitasi, dibiayai, digerakan dan dipimpin (dalam Inu Kencana Syafie 2010:25)

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan oleh para ahli, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik ialah proses dimana personel publik dikoordinasikan dengan baik maupun diorganisir secara sistematis guna

melakukan pekerjaan publik untuk mencapai suatu tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

1.6.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah ketetapan atau keputusan yang diambil maupun tidak diambil oleh pelaksana kebijakan untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan lingkungan pemerintahan (Thomas R. Dye, dalam Inu Kencana Syafie 2010:105). Definisi tersebut memberikan penekanan bahwa kebijakan public pada dasarnya merupakan perwujudan tindakan atau langkah yang diambil dan dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini yaitu pemerintah, dimana kebijakan tersebut bukan hanya sekadar pernyataan keinginan pemerintah. David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan alokasi nilai otoritatif yang diberikan kepada seluruh masyarakat atau dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut, sedangkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, maka dari itu seluruh hal yang dipilih oleh pemerintah termasuk hal yang harus dikerjakan ataupun tidak dikerjakan merupakan hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Parker (Abdul Wahab 2011: 46) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan atau langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan periode waktu tertentu yang berkaitan dengan korelasi dari suatu subjek atau sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu krisis yang terjadi. Chandler dan Plano dikutip Tangkilisan (2003 :1) yang menjelaskan bahwasanya kebijakan public sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan publik maupun pemerintah

melalui pendayagunaan secara sistematis sumberdaya-sumberdaya yang tersedia sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Nugrono mendefinisikan bahwa dalam kebijakan public terdapat dua karakteristik , yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan publik ialah suatu hal yang cukup mudah untuk dimengerti, hal ini dikarenakan kebijakan publik memiliki arti sebagai suatu hal yang harus dijalankan guna mencapai suatu tujuan nasional;
2. Selain itu kebijakan publik juga dianggap sebagai suatu hal yang cenderung mudah untuk diukur, hal ini dikarenakan suatu kebijakan publik mempunyai suatu ukuran yang jelas sehingga dapat diukur sejauh mana perkembangan yang telah ditempuh.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan kebijakan publik sebagai suatu langkah yang dipilih oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan persoalan publik guna mewujudkan kepentingan publik secara efektif dan efisien

1.6.4 Implementasi Kebijakan

Tahap penting selanjutnya dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Kebijakan publik dapat menjadi hal yang sia-sia apabila tidak diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan George C. Edward III (Haedar Akib, 2008:2) yang menyatakan bahwa tanpa adanya proses implementasi

yang efektif dalam kebijakan publik maka kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Lineberry (Fadillah, 2003:81) menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah langkah pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara mandiri atau berkerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pada kebijakan yang sudah direncanakan.

Ripley dan Franklik (Budi Winarno, 2007:145) menjelaskan bahwa setelah ditetapkannya undang-undang sebagai otoritas program maupun kebijakan, maka tahap selanjutnya yaitu pengimplementasian kebijakan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) menjelaskan implementasi kebijakan adalah langkah maupun tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik melalui kelompok maupun individu untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Implementasi kebijakan adalah pengendalian aksi-aksi kebijakan untuk mewujudkan kebijakan ke kenyataan yang terjadi (Wiliam N. Dunn dalam Andi, 2018:27). Menurut Suharno (2010 : 187) menyatakan bahwa walaupun tahap rekomendasi atau pertimbangan yang merupakan prosedur cukup rumit dalam proses implementasi kebijakan publik telah dilalui, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dijamin secara keseluruhan. Karena pada dasarnya terdapat beberapa aspek yang memengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan publik selain dari pertimbangan/rekomendasi dari pembuat kebijakan, diperlukan pula adanya sikap komitmen dan konsistensi pelaksana kebijakan, serta bagaimana perilaku dari sasaran kebijakan. Sedangkan menurut Marilee S. Grindle (dalam Supriyadi, 2019) bahwa terdapat dua variable yang utama yang dapat

memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yakni meliputi *content policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi).

Berdasarkan pendapat para ahli terkait implementasi kebijakan, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan secara riil sebagai bentuk tindak lanjut suatu ketentuan maupun peraturan perundangan dengan lebih konkret dan sistematis dari suatu proses perwujudan kebijakan publik guna mencapai suatu tujuan, sehingga melalui pelaksanaan kebijakan diperoleh hasil atau dampak yang diharapkan.

1.6.5 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks dan memiliki peranan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Tanpa melalui tahap implementasi kebijakan, maka program-program kebijakan yang telah disusun akan sia-sia (Budi Winarno, 2012). Menurut Ramdhani (2017:6) menjelaskan bahwasanya terdapat enam dimensi untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dari implementasi kebijakan yakni meliputi konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas, serta efisiensi. Kompleksitas permasalahan yang ada dalam suatu kebijakan membutuhkan analisis yang mendalam. Dalam menganalisis hubungan antarvariabel yang menjadi focus dalam suatu implementasi kebijakan diperlukan adanya teori ataupun model yang relatif operasional. Melalui model kebijakan, akan menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi variable-variable yang berpengaruh

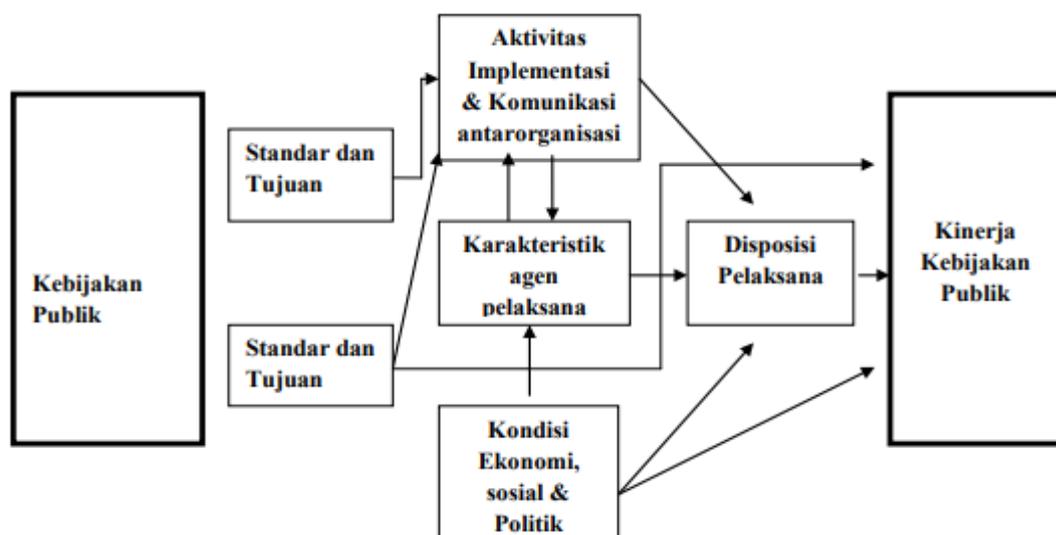
dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat dilihat kendala maupun permasalahan yang timbul selama berlangsungnya proses implementasi kebijakan.

Adapun model-model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut.

1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn memiliki enam variable yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja. Model implementasi kebijakan ini tidak hanya menentukan hubungan antar variable bebas dan variable terikat, namun juga menjelaskan hubungan antar variable bebas tersebut (Budi Winarno, 2012). Menurut Van Metter dan Van Horn bahwa melalui model implementasinya maka terdapat harapan yang besar untuk menggambarkan dan memberikan uraian yang jelas mengenai proses-proses implementasi kebijakan dengan meninjau bagaimana keputusan-keputusan kebijakan tersebut dilaksanakan.

Gambar 1.4 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: *Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:144)*

Adapun 6 variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa standar dan target sasaran tertentu merupakan aspek penting untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan untuk mengukur bagaimana kinerja implementasinya. Standar dan sasaran kebijakan yang tidak jelas dapat berimplikasi timbulnya ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn juga dipengaruhi oleh kehadiran variable sumber daya yang memadai meliputi sumber daya manusia dan non manusia. Selain pertimbangan penting lainnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Struktur birokrasi tidak terlepas dari karakteristik organisasi pelaksana. Struktur birokrasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu norma, karakteristik-karakteristik, maupun pola-pola hubungan yang terbentuk dan memiliki hubungan secara potensial ataupun nyata dalam menjalankan kebijakan secara optimal antar badan pelaksana kebijakan.

d. Hubungan antar organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sinergitas kerjasama antar instansi melalui pembentukan hubungan antar instansi,. Terdapat dua tipe pelaksanaan dalam hubungan-hubungan antar organisasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu bantuan teknis maupun nasihat yang dapat diberikan guna menunjang pelaksanaan kebijakan. Kedua yaitu atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negative.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh aspek kondisi sosial, politik, maupun kondisi ekonomi. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, bahwa pencapaian badan-badan pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh factor-factor ini, walaupun pengaruh yang diberikan tidak terlihat langsung secara signifikan.

f. Disposisi implementor

Terdapat 3 hal penting yang perlu dicermati dalam variable disposisi implementor, yakni 1.) respon yang diberikan oleh implementor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, 2.) kognisi, adalah pemahaman terhadap suatu kebijakan, dan 3.) intensitas disposisi implementor (preferensi nilai implementor).

2. Model George C. Edwards III

Menurut George C. Edward III (dalam Budi Winarno, 2012) menjelaskan studi terkait implementasi kebijakan merupakan hal yang penting dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Edward III mempertimbangkan empat factor ataupun variable krusial dalam implementasi kebijakan publik, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi/birokrasi.

a. Komunikasi

Terdapat 3 hal krusial yang perlu diperhatikan menurut Edward III dalam komunikasi kebijakan, yaitu meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi dari para pelaksana kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan ingin mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan optimal, maka bukan hanya memahami petunjuk pelaksanaan, petunjuk-petunjuk yang diberikan pun harus jelas dan transparan. Persoalan lainnya yang masih mencakup mengenai aspek komunikasi adalah pentingnya konsistensi.

b. Sumberdaya

Keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses implementasi kebijakan, sehingga menjadi tidak berjalan optimal dan tidak efektif. Sumber daya yang penting diantaranya yaitu sumber daya manusia (meliputi para pelaksana kebijakan) dengan keahlian maupun keterampilan yang memadai guna melaksanakan tugas mereka dengan baik, wewenang, fasilitas-fasilitas, maupun sumber daya finansial yang diperlukan guna menunjang implementasi kebijakan.

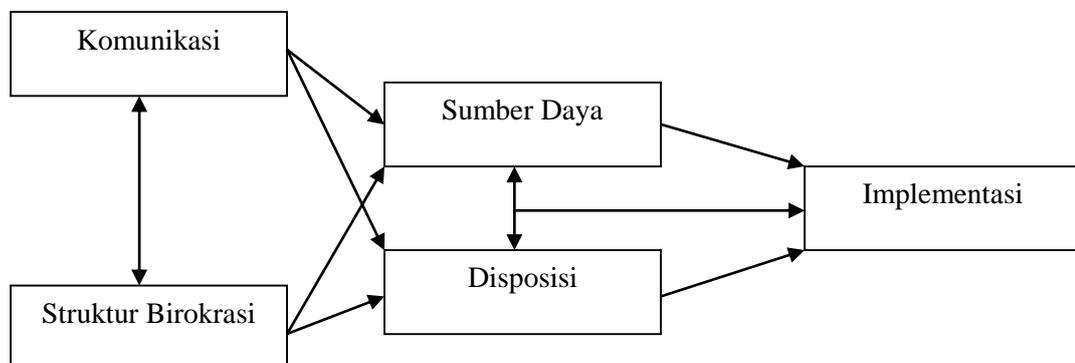
c. Disposisi

Disposisi sebagai karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tendensi dari para pelaksana kebijakan. Apabila implementator bersikap baik pada suatu kebijakan, seperti adanya komitmen yang kuat, konsisten, kejujuran, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh implementator tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

d. Struktur organisasi/birokrasi

Menurut George Edward, terdapat dua karakteristik utama dalam struktur organisasi/birokrasi, yakni fragmentasi maupun prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau yang biasa disebut dengan *Standar Operating Procedures (SOP)*.

Gambar 1.5 Model Implementasi Geogрге C. Edwards III



Sumber: George C. Edward, 1980 (dalam Budi Winarno, 2012)

Edward III menjelaskan model implementasi kebijakan dengan mengacu pada faktor yang berfokus dalam struktur pemerintah guna menjelaskan proses implementasi kebijakan. Penekanan dalam model ini yaitu bahwa apabila para implementasi kebijakan. Penekanan dalam model ini yaitu bahwa apabila para implementator dalam proses implementasinya mengikuti standar pelaksanaan yang

telah ditentukan oleh pembuat kebijakan, maka output dan outcomes dalam kebijakan tersebut dapat terwujud dengan baik.

3. Model Implementasi Soren C. Winter

Model implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter (2003) disebut dengan "*integrated implementation model*", yaitu bahwa implementasi sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, sehingga disebut dengan "*model integrated*". Model implementasi yang disampaikan oleh Winter melihat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan berdasarkan proses formulasi sampai dengan evaluasi, sehingga terdapat keterkaitan.

Winter mengemukakan, terdapat 3 variabel yang memengaruhi proses implementasi yaitu:

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi, yang berdimensi pada komitmen dan koordinasi
2. Perilaku birokrasi, yang berdimensi pada kontrol organisasi, politik, etos kerja maupun norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok target, yang meliputi respon positif dan negative terhadap dukungan suatu kebijakan.

4. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) mengemukakan bahwa *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi) sebagai dua variable besar yang memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan. Dua variabel besar itu meliputi sejauhmana kepentingan kelompok sasaran/penerima manfaat yang termuat dalam isi kebijakan dan perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut, jenis dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, ketepatan letak dari sebuah program/kebijakan, apakah kebijakan tersebut telah menyebutkan pelaksana kebijakan (implementator) secara terperinci, dan dukungan sumber daya yang memadai dalam implementasi kebijakan.

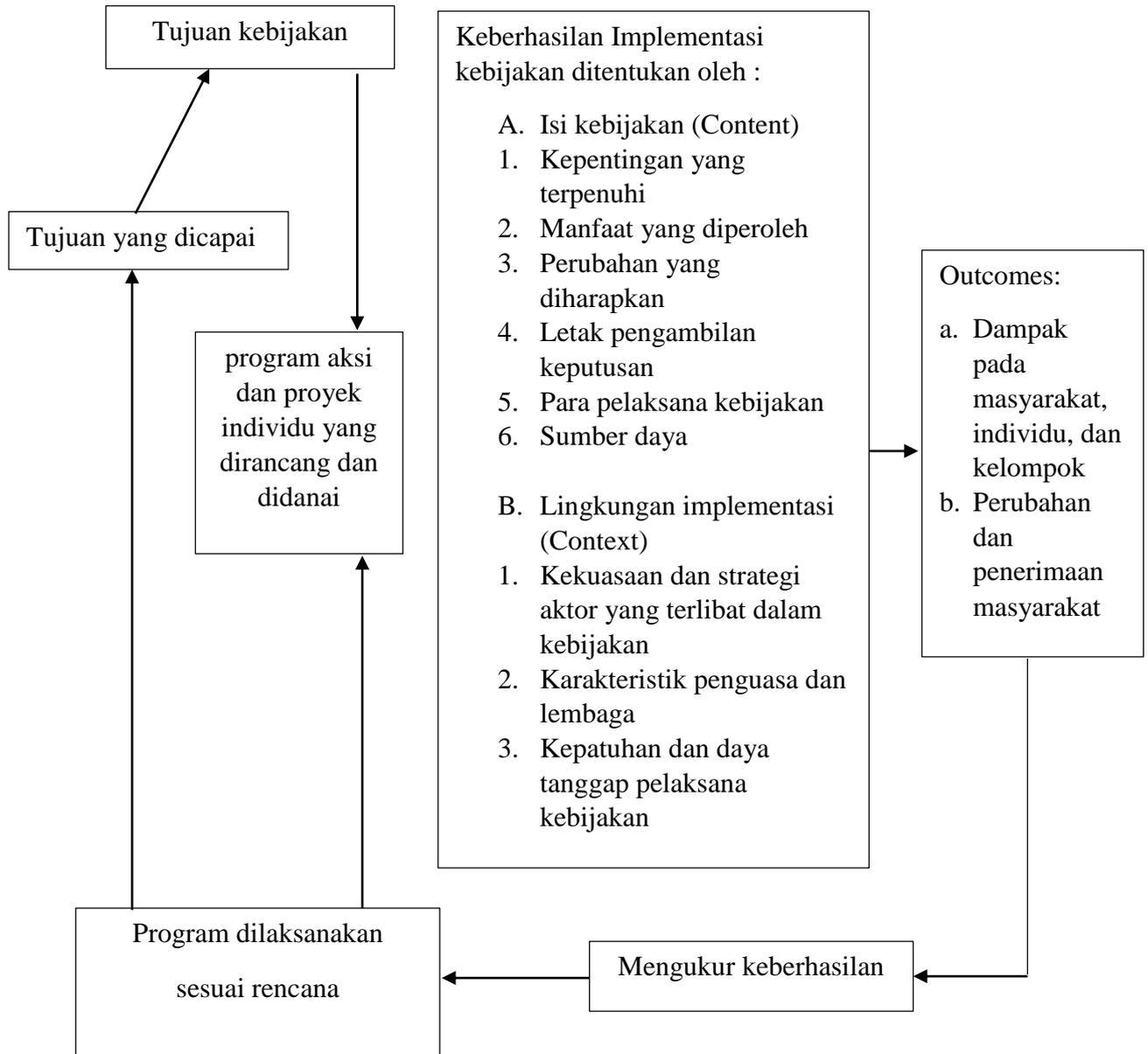
Menurut Grindle, *Content of policy* (isi kebijakan) yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terpenuhi (*Interest Affected*)
- b. Manfaat yang diperoleh (*Type of Benefits*)
- c. Perubahan yang diharapkan (*Exstent of Change Envisioned*)
- d. Letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*)
- e. Para pelaksana kebijakan (*implementator*)
- f. Sumber daya (*Resources Comitted*)

Context of implementation (konteks implementasi) yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan
- b. Karakteristik penguasa dan lembaga
- c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan

Gambar 1.6 Model Implementasi Merilee S. Grindle



Sumber: Marilee S. Grindle, 1980 (dalam Agus Subianto, 2020)

Model implementasi yang disampaikan oleh Grindle menyajikan mengenai struktur kebijakan secara desentralistik, dimana terdapat ruang bagi pelaksana kebijakan untuk menjabarkan tentang kebijakan dengan melalui perumusan program maupun kegiatan. Model ini dianggap lebih komprehensif terhadap konteks kebijakan, terutama menyangkut peran implementator, kelompok sasaran kebijakan, kondisi sumber daya yang diperlukan, serta kemungkinan konflik yang terjadi antar actor.

5. Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983:5) menjelaskan bahwa terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi kebijakan, yaitu administrasi public dan ilmu politik. Berdasarkan perspektif administrasi publik, bahwa implementasi mulanya dipandang sebagai pelaksanaan kebijakan secara eksplisit. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata aktor dalam administrasi juga dipengaruhi oleh tekanan yang ada dalam kelompok kepentingan, lembaga legislatif, dan juga factor lingkungan politis. Sedangkan berdasarkan perspektif ilmu politik meninjau bahwa pentingnya input yang berasal dari luar bidang administrasi. Sehingga focus dari perpektif ini, yakni seberapa jauh stabilitas antara output kebijakan dengan tujuan kebijakan. Sehingga Mazumania dan Paul Sabatier (Agustino 2014:145), membagi tiga variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tingkat kesulitan masalah, meliputi:
 - a. Tingkat kesulitan pada keanekaragaman kelompok target.
 - b. Presentase perbandingan jumlah kelompok target dengan jumlah penduduk.

- c. Perubahan perilaku pada lingkungan.
2. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), berikut indikatornya:
- a. Kejelasan pada tujuan kebijakan.
 - b. Dukungan teoritis pada sebuah kebijakan.
 - c. Sumber daya keuangan yang dianggarkan pada kebijakan.
 - d. Seberapa besar tingkat kerjasama dan komunikasi antara pelaksana.
 - e. Peraturan yang tertuang harus jelas dan konsisten.
 - f. Komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan dari kebijakan.
 - g. Akses partisipasi kelompok luar terhadap implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan(*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- a. Kondisi ekonomi, sosial, dan tingkat perkembangan pengetahuan teknologi.
 - b. Dukungan partisipasi masyarakat untuk kebijakan
 - c. Perilaku lingkungan kelompok target
 - d. Keterampilan implementor harus memadai, dan komitmen tujuan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn karena model implementasi ini tidak hanya mengkaitkan hubungan-hubungan antaran variable bebas dan terikat, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antar variable bebas. Melalui model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan, tidak hanya

sekedar menghubungkan antar variable. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembangunan kepariwisataan.

1.6.6 Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Menurut A.J Burkat (dalam Damanik, 2006) pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu atau sementara untuk keluar dari tempat dimana mereka hidup maupun bekerja guna memperoleh perjalanan wisata. Bakaruddin (dalam Erika 2020:3) menjelaskan pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam. Sejalan dengan pengertian tersebut, Suwanto (2004:2) menyatakan bahwa pariwisata berkaitan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yakni suatu kegiatan perubahan tempat tinggal seseorang dalam jangka waktu tertentu di luar tempat tinggalnya dengan suatu alasan dan tujuan tertentu.

Kebijakan pembangunan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indoneia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pengertian pariwisata menurut undang-undang tersebut adalah kegiatan perjalanan wisata yang ditunjang dengan layanan maupun fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, maupun masyarakat. Pariwisata perlu dikembangkan secara optimal guna meningkatkan minat wisatawan, baik lokal maupun internasional untuk berkunjung. Kebijakan pengembangan pariwisata

sebagai proses berkelanjutan guna melaksanakan proses *adjustment* ataupun *matching* secara berkesinambungan antara *supply* dan *demand* yang terkait dalam kepariwisataan untuk mencapai tujuan (Nuryanti, 1994).

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, terdapat tujuan pembangunan pariwisata yaitu diantaranya meliputi:

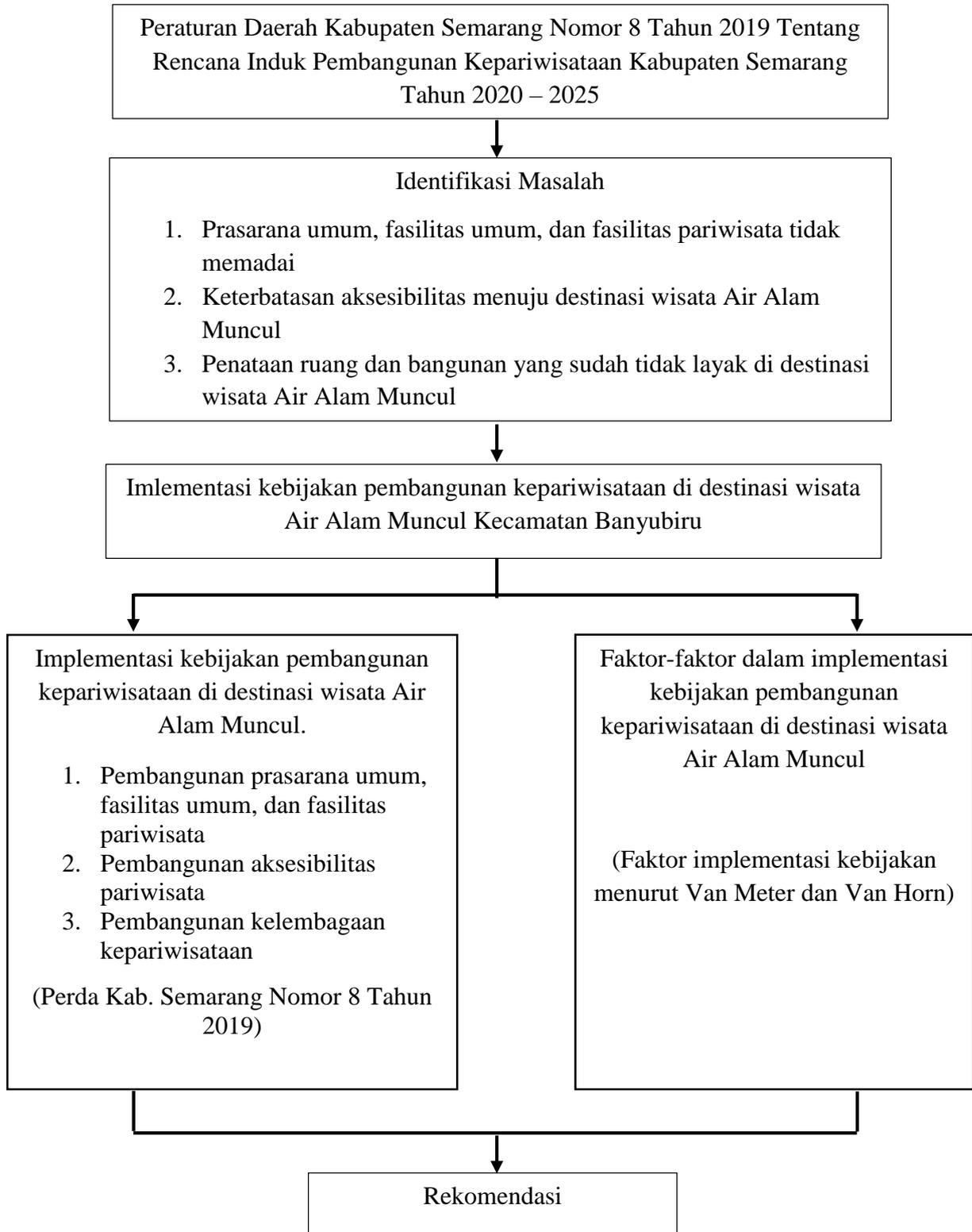
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Menambah kesejahteraan rakyat
3. Membrantas kemiskinan
4. Menangani pengangguran
5. Melindungi alam, lingkungan, dan sumber daya
6. Meningkatkan integritas kebudayaan
7. Meningkatkan citra negara.

Dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan ditujukan agar wisatawan berminat untuk mengunjungi obyek wisata yang disediakan, dengan semakin meningkatnya fasilitas yang ditawarkan diharapkan akan bertambahnya jumlah wisatawan nusantara maupun nasional agar dapat menambah jumlah penghasilan masyarakat lokal maupun daerah setempat. Kebijakan pembangunan pariwisata sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dikarenakan pembangunan pariwisata sebagai bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna memecahkan permasalahan ekonomi dengan melibatkan pariwisata untuk meningkatkan sektor pendapatan.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan kepariwisataan. Keunggulan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang ditandai dengan banyaknya kawasan strategis pariwisata beserta dengan fasilitas penunjangnya. Potensi wisata yang dimanfaatkan dengan baik mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek, meliputi peningkatan perekonomian suatu daerah, pengembangan unsur social dan budaya dalam masyarakat, serta peningkatan daya dukung lingkungan hidup.

Keunggulan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang sehingga melahirkan adanya visi pembangunan kepariwisataan di Kab. Semarang yakni adalah terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing, dan ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, dan Mandiri). Dalam penelitian Dika dan Mustam (2016) menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi pembangunan pariwisata di Kab. Semarang, yaitu pembangunan destinasi wisata daerah, pembangunan promosi maupun pemasaran pariwisata, dan pembangunan kemitraan serta kelembagaan pariwisata. Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

1.6.7 Kerangka Berpikir



1.7 Fenomena Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Destinasi Wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru” menganalisis tentang implementasi kebijakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025, dan mengidentifikasi faktor-faktor dari implementasi kebijakan tersebut.

1. Implementasi Kebijakan

- a. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
 - 1.) Pengembangan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
 - 2.) Pemberian insentif/sumber anggaran
 - 3.) Kerjasama/kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan fasilitas pariwisata
 - 4.) Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
- b. Pembangunan aksesibilitas pariwisata
 - 1.) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi
 - 2.) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi
 - 3.) Kerjasama/kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata

- c. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan
 - 1.) Penguatan organisasi kepariwisataan
 - 2.) Pembangunan SDM pariwisata

2. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Faktor faktor dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru ditemukan setelah melihat fakta di lapangan mengenai kenyataan yang ada. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dikaitkan pula dengan teori yang digunakan oleh peneliti yakni teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan indikator meliputi :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
 - 1.) Pemahaman implementor terhadap pedoman pelaksanaan kebijakan
 - 2.) Tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan kepariwisataan
- b. Sumber daya
 - 1.) Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi kuantitas dan kualitas pelaksana kebijakan
 - 2.) Sumber anggaran dan mekanisme penyediaan sumber anggaran
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
 - 1.) Keterlibatan dan komitmen organisasi formal dan informal
 - 2.) Struktur pelaksana kebijakan yang terlibat dan hubungan kerja sama antar pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
 - 1.) Respon pelaksana dalam implementasi kebijakan

- e. Komunikasi antar organisasi
 - 1.) Kerja sama dan koordinasi antar pelaksana
 - 2.) Sosialisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, politik
 - 1.) Dukungan kelompok kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan
 - 2.) Kondisi ekonomi dan politik daerah dalam pembangunan kepariwisataan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data berbentuk deskriptif dari informan yang diamati. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:3) menjelaskan metode kualitatif merupakan suatu langkah penelitian yang nantinya akan mendapatkan data berupa gambaran atau penjelasan seperti perkataan dari beberapa orang serta tingkah laku yang dapat diamati. Danial dan Nanan (2009:60) menjelaskan bahwasanya metode penelitian kualitatif memerlukan pendekatan secara holistik, artinya bahwa diperlukan pendekatan yang menyeluruh, mendudukkan, suatu kajian dalam suatu konstruksi yang ganda. Nasution (2003:5) menyatakan bahwa metode kualitatif meneliti dan mengamati kondisi subjek yang alamiah dilingkungan sekitarnya, kemudian melakukan interaksi dengan hal yang diamati, serta mencoba memberikan pemahaman terhadap bahasa, dan menafsirkan mengenai lingkungan disekitarnya.

Pendekatan kualitatif memiliki dua tipe penelitian yakni deskriptif dan eksploratif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fenomena social tertentu dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya guna menjelaskan sebab akibat, korelasi, maupun hubungan dalam penelitian tersebut, sedangkan penelitian eksploratif merupakan penelitian yang memiliki tujuan guna menemukan pengetahuan terbaru dari sebelumnya, penelitian

eksploratif juga berupaya untuk menggali dengan mencari tau lebih dalam terkait suatu permasalahan.

Penelitian kualitatif memberikan penekanan terhadap aspek pemahaman data guna memperoleh kualitas dari hasil penelitian. Dengan kata lain bahwa mekanisme kerja penelitian mulai dari pengumpulan data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian berupaya untuk mengandalkan uraian berupa deskripsi kalimat yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif guna menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini pada aspek yang diamati dan menyajikan apa adanya kondisi yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran secara tepat, sifat individu, gejala yang terjadi, keadaan, maupun kelompok tertentu. Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan data atau fakta tertentu berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dimana perolehan data dilakukan melalui wawancara, observasi secara langsung, dokumentasi, serta studi kepustakaan, sehingga dapat memberikan gambaran dan analisis secara tepat dan jelas, dengan begitu maka dapat menjawab pertanyaan penelitian secara terperinci.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah suatu area maupun lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam melakukan

penelitian. Penelitian ini mengambil lokus di Wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru. Adapun penelitian ini berfokus tentang bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam implementasi kebijakan pembangunan kepariwisataan. Peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul sebagai salah satu destinasi yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait implementasi dan faktor penghambatnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Sugiyono (2013:32) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan atribut, objek yang diteliti, maupun aktivitas suatu subjek yang memiliki variable yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti, sehingga dapat ditelaah dan ditarik kesimpulan. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengacu pada pertimbangan tertentu karena dibutuhkan narasumber dengan kriteria yang relevan dengan fenomena yang akan diteliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek yang dibutuhkan harus memahami betul mengenai substansi dalam penelitian ini agar dapat memberikan data sesuai dengan fokus dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
2. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Wisatawan
3. Kepala UPTD Dinas Pariwisata

4. Koordinator Lapangan Wisata Air Alam Muncul
5. Pelaku usaha
6. Biro Perjalanan Wisata
7. Masyarakat atau wisatawan

1.8.4 Sumber Data

Sutopo (2006:56-57) menjelaskan bahwa sumber data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu data dengan memerlukan metode tertentu, diantaranya melalui manusia, artefak, atau bentuk dokumen. Menurut Moleong (2001:112) sumber data adalah perolehan data yang dilakukan melalui proses wawancara maupun observasi dan merupakan gabungan hasil dari aktivitas mendengar, melihat, atau mengajukan pertanyaan. Menurut Sugiyono (2005) sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan sekunder dengan batasan sesuai tujuan penelitian.

1. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan wawancara menyangkut topik penelitian dan observasi sesuai lokasi penelitian.
2. Data sekunder adalah data penelitian yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi sumber data primer, data yang sudah dikumpulkan menjadi sumber penunjang lainnya dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku,

jurnal/artikel, penelitian terdahulu, peraturan terkait dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut penjelasan Sugiyono (2013:224) adalah upaya strategis yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan guna memperoleh data penelitian. Secara umum teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Menurut Ridwan (2010:51) pengertian teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh atau mengumpulkan sumber data. Dalam penelitian ini perolehan sumber data dilakukan melalui teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara menurut penjelasan Moelong (2012:186) adalah suatu percakapan maupun diskusi yang dilakukan dengan tujuan dan maksud memperoleh sumber data primer untuk menunjang penelitian. Sedangkan Sugiyono (2017:233) membagi teknik wawancara menjadi 3 bagian yaitu terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilaksanakan dengan mempersiapkan interview guide (pertanyaan) yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Proses wawancara dilaksanakan guna mendapatkan informasi yang jelas dengan melakukan interaksi tanya jawab dengan narasumber yang dilakukan sesuai panduan wawancara yang telah dibuat

sebelumnya. Peneliti akan mencatat informasi sesuai dengan apa adanya yang disampaikan oleh narasumber.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan dengan proses pengamatan terkait keadaan di lokasi penelitian. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat lebih memahami tentang subjek maupun objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan yaitu berpartisipasi atau observasi partisipatif, yaitu observasi dimana peneliti terjun langsung dan ikut serta berpartisipasi pada kegiatan yang dilakukan oleh narasumber yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data dari informan di destinasi wisata Air Alam Muncul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data guna penelusuran data secara histori yang pada umumnya digunakan oleh penelitian social (Gunawan, 2014: 79). Dokumentasi digunakan untuk memberikan penguatan bukti yang didasarkan pada data dari tiap instansi yang akan dilakukan penelitian. Proses dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan data-data yang menjadi sumber informasi yang diperoleh, seperti ketersediaan dokumen resmi yang sesuai dengan permasalahan dan dibutuhkan dalam mendapatkan informasi. Diantaranya yaitu dokumen laporan maupun kebijakan/peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan di destinasi wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru.

d. Literature Review

Literature review adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya untuk memperkuat data maupun informasi yang ada dalam penelitian. Bahan pustaka seperti pendapat dari para ahli yang ada di dalam buku, artikel, maupun jurnal kemudian dicatat dan dikutip untuk menguatkan landasan teori dalam penelitian dengan menggunakan topik yang relevan. Kaitannya dengan hal ini, peneliti menggunakan buku, artikel, maupun jurnal penelitian terdahulu yang topiknya relevan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009:244) teknik analisis data adalah analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, observasi dan data lainnya, sehingga dapat dipahami dengan jelas dan terperinci. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data pada dasarnya merupakan merangkum, yakni berfokus melakukan penyederhaaan hasil penelitian, abstrak, serta transformasi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Peneliti melaksanakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan topik dan tujuan penelitian, lalu data tersebut dirangkum sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.

b. ATLAS.ti

Peneliti menggunakan alat bantu berupa software ATLAS.ti dalam proses analisis data penelitian kualitatif guna menghasilkan penyajian data yang lebih terstruktur. ATLAS.ti adalah software yang digunakan untuk mengorganisir dan pemberian kode terhadap data yang telah diperoleh, sehingga penyajian data penelitian kualitatif menjadi lebih efektif, sistematis, dan terstruktur. Data-data yang dapat ditelaah oleh ATLAS.ti yakni meliputi data melalui audio, video, gambar, ataupun data secara tertulis (data survey dan transkrip wawancara).

c. Penyajian Data

Selanjutnya yaitu penyajian data, dimana data yang sudah dirangkum akan dikembangkan kembali menjadi deskripsi informasi yang sistematis untuk dijadikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk bagan, hubungan, atau uraian singkat tentang data yang sudah direduksi dan dianalisis melalui ATLAS.ti.

d. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya yaitu peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disampaikan. Penarikan kesimpulan dapat berupa gambaran mengenai objek, kondisi, dan fenomena yang diperoleh dari sumber data penelitian.

1.8.7 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2008:267) kualitas data adalah presisi atau keakuratan dari data yang telah disampaikan peneliti dengan yang terjadi di lapangan. Salah satu teknik untuk menguji keabsahan data, yakni melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:274) menguraikan tiga jenis teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknis dan waktu. Triangulasi memiliki tujuan guna menguatkan penelitian secara teoritis maupun metodologis, serta interpretatif dari penelitian yang telah dilakukan.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilaksanakan dengan proses pengecekan ulang keabsahan data melalui sumber lain yang telah memperoleh data sebelumnya. Data yang telah didapat melalui beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, maupun ditelaah, apakah terdapat pandangan yang sama maupun berbeda. Setelah data tersebut dianalisis, maka dihasilkan suatu kesimpulan dari berbagai sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknis

Triangulasi teknis yaitu pengujian keabsahan data yang dilakukan melalui proses pengecekan data melalui teknik/metode yang berbeda terhadap sumber yang sama. Apabila dalam pengujian keabsahan data melalui berbagai teknik ternyata menimbulkan perbedaan hasil, dapat dilakukan diskusi lanjutan dengan informan/narasumber yang sama hingga diperolehnya kepastian maupun kebenaran data.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu pengujian keabsahan data yang dilakukan melalui pengecekan ulang terhadap sumber data dengan teknik yang sama, namun pada situasi dan waktu yang berbeda.